

**PROGRAM BANTUAN PERUMAHAN LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
DAERAH ALIRAN SUNGAI DI DESA KUALA TERUSAN KABUPATEN
PELALAWAN (SUATU ANALISIS PENDEKATAN PEMBANGUNAN)**

Oleh: Satria Rahmaddan

Email: satriaramadhan013@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. Syamsul Bahri, M.Si

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-

Tlp n/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kuala Terusan Kabupaten Pelalawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspirasi masyarakat Desa Kuala Terusan terhadap program bantuan perumahan layak huni sesuai dengan kebutuhan. Topik fokus penelitian ini adalah pendekatan pembangunan yang digunakan pemerintah dalam merealisasikan program bantuan perumahan layak huni yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kuantitatif dan menetapkan sampel sebanyak 50 orang Kepala Keluarga (KK) dengan menggunakan metode *random sampling* dan Instrumen data adalah angket atau kuisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam program bantuan perumahan layak huni di Desa Kuala Terusan menggunakan konsep pendekatan pembangunan *Top-Down* (Dari atas kebawah). Dimana Perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah sebagai pemberi gagasan serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi, peran masyarakat tidak dilibatkan. Aspirasi masyarakat terhadap program bantuan perumahan layak huni, aspirasi responden terhadap lokasi; lokasi yang tidak jauh dari sungai, namun tidak berada pada dataran rendah. Aspirasi responden terhadap bentuk rumah; bentuk rumah tipe berpanggung. Aspirasi responden terhadap fasilitas; fasilitas seperti sumur, kamar mandi, dan tempat penampungan air.

Kata Kunci: Program Bantuan, Pendekatan Pembangunan, Aspirasi

**PROGRAM AID HOUSING WORTH LIVING FOR THE REGIONAL
THE STREAM RIVER IN THE VILLAGE KUALA TERUSAN PELALAWAN
REGENCY (A ANALISIS APPROACH DEVELOPMENT)**

*By: Satria Rahmaddan
Email: satriaramadhan013@gmail.com
Supervisor : Drs. Syamsul Bahri, M.Si
Department of Sociology, Faculty of Social Sciences Political Science
University Riau
Campus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Tlp n/Fax. 0761-63277*

ABSTRACT

This research carried out in the Village Kuala Terusan Pelalawan Regency. The purpose of this research is to analyze the aspirations of the Village Kuala Terusan against the help of the housing worth living in accordance with the needs of. The focus of this study is the development of the use of the government in objectify program help housing worth living given to the public. This study using a quantitative analysis of the descriptive and set a sample of as munch 50 People Head Family (HF) using a method random sampling and instrumen data is inquiries or kuisisioner, the interview, observations, and the documentation.

Research conducted, the authors found that the development that carried out of the government in the help of the housing worth living in the Village Kuala Terusan using the concept of the development of Top-Down (from the top to bottom). Where planning carried out by the government as the default the idea of as well as the government to act more dominant in set the program that originated from, the process of planning to evaluation, the role of people don't be involved. The aspirations of the people of the help of the housing worth living, the aspirations againts the location; the location that is not far from the river, but not to be in the low. The aspirations of the respondents againts the form of the house; the form of house type the stage. The aspirations of the respondents againts the facility; the facility as well, the bathroom, and shelters water.

Keywords: The help program, approach reconstruction, aspirations

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang menjadi ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan seringkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001: 21). Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Hendriwan, 2003: 35).

Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga masyarakat bukan lagi sebagai obyek melainkan sebagai subyek pembangunan (Roestanto, Wahidi, 2015: 27).

Pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang sudah direncanakan. Salah satu bidang dari pembangunan ini adalah pembangunan sosial. Bisa dikatakan bahwa pembangunan sosial adalah perubahan sosial yang direncanakan. Pembangunan sesungguhnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia bukan saja dari segi ekonomi, namun juga sosial. Pembangunan sosial berupaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui berbagai kegiatan seperti pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), dan pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan,

kesejahteraan sosial, perumahan dan lingkungan.

Sebagaimana diketahui, tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka pembangunan masyarakat tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menuntut pemecahan. Pembangunan masyarakat diharapkan akan dapat tampil sebagai salah satu alternatif untuk melakukan upaya pemecahan masalah dan perbaikan kondisi tersebut (Soetomo, 1995: 116).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (Nani, Soewondo, 1982: 01).

Rumah merupakan salah satu keperluan dasar manusia yang tingkat kepentingannya lebih rendah dari sandang dan pangan. Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia. Negara memiliki kewajiban azasi untuk menyediakan perumahan bagi warganya, khususnya mereka yang tergolong keluarga kurang mampu. Pelayanan perumahan yang

disediakan pemerintah adalah perumahan publik atau perumahan sosial (Edi, Suharto, 2013: 16).

Konsep pemberdayaan yang merupakan bagian dari pembangunan sosial muncul sebagai jawaban atas kegagalan konsep pembangunan terdahulu, yang semata menekankan pada pertumbuhan atau pemerataan. Dalam pembangunan sosial ini dengan konsep pemberdayaan banyak pemerintah daerah yang melakukan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang melakukan program pemberdayaan masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan memberikan bantuan perumahan layak huni kepada masyarakat Desa Kuala Terusan yang berada di pinggiran aliran sungai kampar.

Hal terpenting dalam pemberdayaan adalah partisipasi aktif setiap pengambilan keputusan. Pola demikian sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi. Diantara banyak pilihan yang ada di masyarakat. Namun demikian, pada kenyataannya keseluruhan dikerjakan oleh para profesional atas nama pemberdayaan. Pendekatan tersebut dapat gagal menjalankan fungsinya dalam proses kontrol terhadap masyarakat untuk akses terhadap sumber. Dengan perkataan lain pemberdayaan hanyalah retorika yang menyelimuti jasa-jasa pelayanan sosial.

Kabupaten Pelalawan adalah sebuah Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Kampar. Sebagai Kabupaten yang baru mekar, Pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak mau terlena dalam hal pembangunan. Oleh karena itu, Bupati Pelalawan beserta seluruh perangkatnya melakukan pembangunan disegala aspek. Baik struktur maupun

infrastruktur yang dapat menunjang perkembangan masyarakat Pelalawan yang sebagian besar belum pernah tersentuh pembangunan semasa Pemerintah Kabupaten Kampar.

Wilayah Kabupaten Pelalawan dilalui oleh sebuah Sungai besar yaitu Sungai Kampar. Karena itu tidak heran apabila sebahagian dari masyarakat Kabupaten Pelalawan adalah masyarakat perairan yang menjadikan pinggiran sungai sebagai tempat tinggal dan sungai dijadikan sebagai sumber mata pencarian.

Desa Kuala Terusan adalah salah satu dari sekian banyak desa di Kabupaten Pelalawan yang berada di pinggiran aliran Sungai Kampar, yang mana Desa ini bagian dari Kecamatan Pangkalan Kerinci. Untuk mengunjungi desa ini harus menggunakan sampan atau pompong sebagai transportasi penyebrangan.

Desa Kuala Terusan merupakan desa yang berada dipinggiran aliran Sungai Kampar, yang secara umum mata pencaharian masyarakat mayoritas bekerja sebagai nelayan dan sebagian ada yang bekerja sebagai petani (karet dan sawit). Tingkat pendapatan masyarakat sebagian besar menengah kebawah, karena pekerjaan masyarakat yang mayoritas nelayan sehingga penghasilan tidak menentu. Hampir di setiap tahunnya masyarakat Desa Kuala Terusan dilanda banjir berkepanjangan, sehingga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya mencari nafkah dengan memanfaatkan hasil tangkap di sungai.

Tabel 1.1
Data Pekerjaan Masyarakat Desa
Kuala Terusan

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Nelayan	87
2.	Petani (Karet dan Sawit)	19
3.	Tukang	14
4.	Honoror	12
5.	PNS	1
Jumlah		115

Sumber: Kantor Kepala Desa Kuala Terusan, September 2017

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial melakukan program pemberdayaan masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Kuala Terusan, dengan harapan seluruh masyarakat yang mendapatkan bantuan perumahan layak huni, untuk pindah dari pemukiman Desa yang berada dipinggiran aliran sungai agar tidak dilanda banjir berkepanjangan. Berikut adalah jumlah bantuan perumahan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan:

Tabel 1.2
Jumlah Bantuan Perumahan Layak
Huni Di Desa Kuala Terusan

No	Bantuan	Tipe Rumah 36		Jumlah
		Batu	Papan	
1.	Perumahan Layak Huni	25 Unit	75 Unit	100 Unit
Jumlah				100 Unit

Sumber: Kantor Kepala Desa Kuala Terusan, September 2017

Berdasarkan tabel diatas, jumlah bantuan perumahan sosial di Desa Kuala Terusan sebanyak 100 unit dengan tipe 36. Sistem penerimaan bantuan perumahan sosial tidak berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan, namun atas kesepakatan bersama antara masyarakat dan Pemerintah Desa penerimaan bantuan perumahan layak huni menggunakan

sistem acak. Sistem acak tersebut dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa dengan dihadiri seluruh masyarakat Desa Kuala Terusan.

Setelah pembangunan perumahan layak huni selesai, program pemberdayaan masyarakat di Desa Kuala Terusan mengalami masalah. Masyarakat yang mendapatkan bantuan perumahan layak huni seharusnya tinggal dan menetap dirumah yang telah diberikan, lebih memilih membiarkan dan kembali tinggal di pinggiran aliran Sungai. Hal ini terlihat janggal karena program yang dilakukan pemerintah seolah-olah tidak begitu menyentuh kepada apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, sehingga bantuan rumah tersebut tidak dirasakan begitu besar manfaat bagi masyarakat.

Puluhan perumahan layak huni yang berada di Desa Kuala Terusan diperjual belikan oleh masyarakat yang menerima bantuan tersebut, dengan harga tiga sampai lima Juta per unitnya. Masyarakat terpaksa menjual rumah beserta tanah tersebut dengan harga murah karena rumah bantuan yang diberikan pemerintah tidak memiliki sertifikat. Rumah yang sudah dijual langsung dibongkar oleh pembelinya, ada sebagian tanah yang di tanam kelapa sawit dan sebagiannya lagi dibiarkan kosong.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Program Bantuan Perumahan Layak Huni Bagi Masyarakat Daerah Aliran Sungai di Desa Kuala Terusan Kabupaten Pelalawan (Suatu Analisis Pendekatan Pembangunan)”**

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendekatan pembangunan yang digunakan

- pemerintah dalam program bantuan perumahan layak huni bagi masyarakat Daerah Aliran Sungai di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
2. Apakah aspirasi masyarakat Daerah Aliran Sungai terhadap program bantuan perumahan layak huni sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pendekatan pembangunan yang digunakan pemerintah dalam merealisasikan program bantuan perumahan layak huni yang diberikan kepada masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk menganalisis aspirasi masyarakat Desa Kuala Terusan terhadap program bantuan perumahan layak huni sesuai dengan kebutuhan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang-bidang sosial khususnya sosiologi.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti-peneliti yang membahas dan mengkaji masalah yang sama.
3. Sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa bangku perkuliahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan identik dengan proses membantu kelompok miskin dalam pembangunan seperti dijelaskan oleh Schumpcker (dalam Hikmat, 2004:2) menjelaskan bahwa kelompok miskin dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan. Pemberdayaan masyarakat oleh Rappaport (dalam Hikmat, 2004:3) dilihat sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu, menurut Mc Ardle (dalam Hikmat, 2004:3) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut, ada empat kriteria pemberdayaan yaitu:

1. *Social Need* (Keinginan), yaitu apa keinginan masyarakat yang ingin diberdayakan tersebut sehingga hal yang dilakukan mendapat tanggapan baik dari masyarakat tersebut.
2. *Social Demand* (Kebutuhan), yaitu kebutuhan apa yang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat sehingga yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya.
3. *Social Will* (Hakikat), yaitu apa sebenarnya hakikat dari program yang ingin dilakukan tersebut apakah benar-benar untuk meningkatkan kehidupan lain atau adanya kepentingan-kepentingan lain seperti kepentingan ekonomi, politik, dan lainnya.
4. *Social Expectation* (Harapan), yaitu apa harapan yang ingin dicapai dengan melakukan pemberdayaan ini.

Konsep Pembangunan Desa

Konsep pembangunan yang sudah diperluas melibatkan aspek lingkungan dan keadilan sosial, pada dasarnya masih bersifat materialis. Yang dipersoalkan terbatas pada persoalan materi yang mau dihasilkan dan yang mau dibagi. Hal ini disebabkan karena teori pembangunan masih sangat didominasi oleh para ahli ekonomi. Kalau kita renungkan, pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. Pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi. Kedua, masalah manusia yang menjadi pengambilan inisiatif, yang menjadi manusia pembangunan (Arief, Budiman, 2000:13-14).

Menurut Rostow (dalam Sabarno, 2013:92) transformasi dari negara terbelakang menjadi negara maju dapat terjadi setelah melalui urutan tahapan pembangunan. Lima tahapan yang harus dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya adalah:

1. Masyarakat Tradisional (*traditional society*)
2. Masa menjelang pertumbuhan (*precondition of growth*)
3. Tinggal landas (*take off*)
4. Pengendalian kelahiran (*the darive of maturity*)
5. Era masyarakat konsumtif (*the age of high mass-consumption*)

Teori Pembangunan

Menurut Sondang P. Siagian (2008:5), Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk tumbuh secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Menurut Todaro dan Smith (2003), dalam Arsyad (2011:45) pembangunan harus dilihat sebagai

suatu proses yang multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan mendasar didalam struktur sosial, perilaku masyarakat, perbaikan institusi-institusi yang seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Program Perumahan layak huni

Program perumahan layak huni merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan tujuan dalam rangka merelokasikan penduduk kawasan rawan banjir dari pemukiman pinggir sungai agar tidak terkena dampak banjir setiap tahunnya.

Pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah membangun sebanyak 200 unit rumah layak huni, diantaranya untuk masyarakat Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci 100 unit dan Desa Sering Kecamatan Pelalawan 100 unit. Pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Pelalawan kembali memberikan bantuan perumahan layak huni sebanyak 100 unit kepada masyarakat Desa Kuala Terusan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana isi dari penelitian berisi tabel-tabel yang akan dijelaskan secara narasi agar lebih dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Metode yang digunakan adalah dengan menampilkan data-data yang sudah ada didapat dalam tabel-tabel dan berisi uraian-uraian yang bersifat narasi. Data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu masyarakat dan pemerintah.

Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan tujuan program yang ingin melakukan pemberdayaan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya meningkatkan pemukiman penduduk. Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama, sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel, suatu kumpulan yang memenuhi syarat yang berkaitan dengan masalah penelitian. Karena itu populasi tidak hanya individu atau orang yang diteliti, tetapi obyek dan benda-benda yang berkaitan dengan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam objek penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Kuala Terusan yang menerima bantuan perumahan sosial dari pemerintah. Dari populasi penerima program bantuan perumahan sosial berjumlah 100 KK, dan peneliti menetapkan sampel yang akan diteliti sebanyak 50 KK. Dengan menggunakan metode random sampling dimana pengambilan sampel secara acak dan setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama. Dalam cara ini peneliti akan melaksanakan pengambilan sampel secara bertahap.

Jenis Sumber Data

1. Data primer adalah data yang peneliti dapatkan dari lokasi penelitian yakni di Desa Kuala Terusan. Data primer berisi tentang sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dari responden.

Observasi dilakukan dengan cara mengamati peristiwa dan aktivitas di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung dari responden yang melainkan dalam bentuk laporan, angket atau kuisisioner maupun tulisan yang akan di peroleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian seperti Kantor Kepala Desa Kuala Terusan, jurnal online, artikel, dan juga skripsi terdahulu. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang terkait dengan fenomena yang terjadi.

Teknik Pengumpulan Data

1. Angket atau kuisisioner
Daftar pertanyaan yang berbentuk angket dan peneliti langsung mengisi sesuai dengan jawaban responden, hal ini disebabkan sebagian besar responden adalah masyarakat desa yang tidak semuanya bisa mengisi angket secara individual. Pertanyaan di dalam kuisisioner seputar identitas responden, tanggapan terhadap program bantuan perumahan layak huni, dan Aspirasi masyarakat terhadap program bantuan perumahan layak huni.
2. Wawancara
Wawancara yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengobrol atau menanyakan langsung tentang masalah yang akan diteliti terhadap responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan. Wawancara ini dilakukan secara terbuka, dengan kata lain peneliti akan menanyakan hal-hal yang perlu dan memberikan sepenuhnya kepada responden untuk menjawab pertanyaan peneliti tanpa dipengaruhi. Melalui wawancara

peneliti bisa berinteraksi secara langsung dengan responden penelitian dan memilih teknik wawancara terstruktur, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan seputar masalah penelitian.

3. Observasi
Observasi atau pengamatan dilakukan untuk melihat langsung melalui peninjauan ke lapangan dengan tujuan mendapatkan informasi objektif. Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah kondisi dan situasi lokasi penelitian terutama perumahan layak huni yang sudah dibangun dan diberikan kepada masyarakat Desa Kuala Terusan.
4. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan kumpulan data baku yang diperoleh dari instansi atau organisasi yang terkait, yang meliputi sumber-sumber atau data penelitian yang peneliti butuhkan. Dokumentasi diperlukan untuk menggambarkan dan menjelaskan fakta yang terjadi sebagai pendukung hasil penelitian berbentuk surat-syarat, laporan, foto-foto, dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif deskriptif. Karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, maka teknik analisis dari temuan-temuan lapangan (baik berupa data dan informasi hasil pengisian angket atau kuisioner, wawancara, catatan lapangan dokumentasi, dan lain sebagainya) dengan cara menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh dari laporan penelitian berupa angket/kuisioner yang telah

dikumpulkan dengan menggunakan tabel-tabel serta gambar secara statistik deskriptif yang diinterpretasikan, olahan data tersebut berdasarkan jawaban responden dari pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisioner yang sudah di desain oleh peneliti. Kemudian dianalisa dan dituturkan dalam bentuk kalimat untuk kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Pendekatan Pembangunan Program Bantuan Perumahan Layak Huni

Perencanaan Program

Perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana

Pengetahuan Responden Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Melalui Diskusi yang Dilakukan Pemerintah

No	Pengetahuan Responden	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pernah	1	2,0
2	Tidak Pernah	49	98,0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Data Olahan, 2018

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya dalam perencanaan pembangunan perumahan layak huni pada tahap penyusunan dan penetapan perencanaan pemerintah tidak pernah melakukan diskusi terbuka ke masyarakat untuk memberikan informasi secara langsung mengenai program bantuan perumahan layak huni, ataupun untuk menampung aspirasi masyarakat.

a. Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan individu responden tentang program bantuan perumahan layak huni. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui oleh seseorang. Seluruh responden mengetahui tentang program bantuan perumahan layak huni di Desa Kuala Terusan, dari 50 responden yang mendapatkan bantuan tidak ada yang menyatakan tidak tahu terhadap program bantuan tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 100% responden mengetahui tentang program bantuan perumahan layak huni, informasi tentang program bantuan tersebut bisa didapatkan melalui surat pemberitahuan dari pemerintah, informasi melalui perangkat desa, melalui diskusi terbuka yang dilakukan pemerintah, dan atau melalui informasi yang beredar dikalangan masyarakat.

b. Sumber Pengetahuan

Sumber pengetahuan yang dimaksud adalah sumber pengetahuan masyarakat atau responden mendapatkan informasi mengenai program bantuan perumahan layak huni di Desa Kuala Terusan.

Sumber Pengetahuan Responden Tentang Program Bantuan Perumahan Layak Huni

No	Sumber Pengetahuan Responden	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Melalui Surat Pemberitahuan	-	-
2	Melalui Perangkat Desa	27	54,0
3	Melalui Diskusi Terbuka	-	-
4	Informasi Masyarakat	23	46,0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Data Olahan, 2018

Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh responden yang sudah mengetahui tentang program bantuan

perumahan layak huni mendapatkan informasi melalui perangkat desa secara langsung dan sebagian responden mendapatkan informasi melalui kabar yang beredar dikalangan masyarakat dengan. Tidak ada langkah diskusi secara langsung yang dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi atau mendengarkan aspirasi masyarakat terhadap harapan dari program bantuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap program bantuan itu didapatkan melalui informasi dari perangkat desa dan juga berita yang beredar dikalangan masyarakat.

Pelaksanaan Program

1. Pengerjaan

Pengetahuan Responden Tentang Pengerjaan Perumahan Layak Huni

No	Sumber Pengerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Gotong Royong	-	-
2	Kontraktor	41	82,0
3	Tidak Tahu	9	18,0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Data Olahan, 2018

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan pengerjaan perumahan layak huni dilakukan secara tender atau dikerjakan oleh kontraktor tanpa melibatkan masyarakat, hal tersebut diperkuat dengan tidak ada responden yang menjawab bahwa pengerjaan perumahan dilakukan dengan bergotong-royong.

2. Administrasi

Seluruh responden menjawab tidak ada bukti administrasi yang diberikan pemerintah sebagai penerima bantuan perumahan layak huni atas nama penerima bantuan tersebut. Penerima bantuan tidak ada diberikan sertifikat tanah/rumah maupun surat tanda terima sebagai penerima bantuan. Hal ini dapat disimpulkan masyarakat yang mendapatkan bantuan tidak

memiliki legalitas sebagai penerima bantuan.

ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM BANTUAN PERUMAHAN LAYAK HUNI

Lokasi

Lokasi perumahan tersebut menjadi hal yang sangat penting mengingat tujuan dari program bantuan perumahan layak huni adalah untuk merelokasikan pemukiman penduduk rawan banjir ke daerah yang lebih aman. Berikut penilaian masyarakat terhadap kesesuaian lokasi pembangunan perumahan dengan yang diharapkan masyarakat:

Penilaian Responden Terhadap Lokasi Pembangunan Perumahan

No	Tingkat Penilaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sudah Tepat	2	4,0
2	Kurang Tepat	3	6,0
3	Tidak Tepat	45	90,0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Data Olahan, 2018

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya lokasi pembangunan tidak sesuai dengan tujuan pemerintah melakukan relokasi pemukiman untuk menghindari masyarakat dari rawan banjir setiap tahunnya.

Bentuk Rumah

Desa Kuala Terusan merupakan daerah pemukiman yang berada dipinggiran aliran sungai, sehingga seluruh masyarakat membangun rumah dengan bentuk rumah panggung. Berikut aspirasi responden tentang bentuk rumah yang diinginkan masyarakat dari program bantuan perumahan layak huni:

Aspirasi Responden Mengenai Bentuk Rumah Yang Diinginkan

No	Bentuk Rumah	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tipe Berpanggung	38	76,0
2	Tipe Tidak Berpanggung	10	20,0
3	Lainnya	2	4,0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Data Olahan, 2018

Dapat disimpulkan bahwasanya karna sebagian besar masyarakat menginginkan lokasi bantuan perumahan dekat dari sungai, masyarakat menginginkan bentuk rumah dengan tipe berpanggung. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terhindar dari bencana banjir yang setiap tahunnya terjadi.

Mutu Bangunan

Mutu bangunan merupakan standart kualitas dari bangunan perumahan layak huni, yang seharusnya perlu dilakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu yang meliputi bahan, pengujian berkala, cara pelaksanaan, dan pemeliharaan. Berikut penilaian responden tentang hasil pengerjaan pembangunan perumahan layak huni menurut masyarakat:

Penilaian Responden Tentang Hasil Pengerjaan Pembangunan Perumahan Layak Huni

No	Penilaian Responden	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Memuaskan	31	62,0
2	Kurang Memuaskan	19	38,0
3	Tidak Memuaskan	-	-
Jumlah		50	100,0

Sumber : Data Olahan, 2018

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya sebagian besar masyarakat puas dengan hasil pengerjaan pembangunan. Akan tetapi saat ini

hanya beberapa rumah yang layak untuk dihuni.

Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu sarana prasarana sebagai pemenuhan kebutuhan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam hal menjalani aktifitasnya sehari-hari. Berikut penilaian responden tentang fasilitas di lokasi perumahan layak huni:

Penilaian Responden Tentang Fasilitas Di Lokasi Perumahan Layak Huni

No	Penilaian Responden	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Memadai	-	-
2	Kurang Memadai	46	92,0
3	Tidak Memadai	4	8,0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Data Olahan, 2018

Dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat masih merasakan fasilitas yang diberikan di perumahan layak huni masih sangat kurang memadai.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan serta menyarankan hal-hal sebagai berikut:

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis buat dalam tulisan ini berkaitan dengan segala upaya yang telah penulis lakukan di dalam penelitian ini dengan didasarkan kepada data-data yang telah penulis dapatkan dilapangan.

1. Peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam program bantuan perumahan layak huni di Desa Kuala Terusan menggunakan konsep pendekatan

pembangunan *Top-Down* (Dari atas kebawah). Dimana Perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah sebagai pemberi gagasan serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi, peran masyarakat tidak dilibatkan.

2. Aspirasi masyarakat Desa Kuala Terusan terhadap program bantuan perumahan layak huni tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena masyarakat tidak merasakan manfaat dari adanya program bantuan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan hanya ada 4 (empat) unit rumah yang saat ini dihuni, selebihnya ditinggalkan masyarakat dan sudah banyak yang rusak parah sehingga tidak layak untuk dihuni. Aspirasi responden terhadap lokasi; lokasi yang tidak jauh dari sungai, namun tidak berada pada dataran rendah. Aspirasi responden terhadap bentuk rumah; bentuk rumah berpanggung. Aspirasi responden terhadap fasilitas; fasilitas seperti sumur, kamar mandi, dan tempat penampungan air.

Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah sebelum membuat sebuah kebijakan dalam hal memberikan bantuan ke masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pemukiman penduduk hendaknya melakukan diskusi bersama masyarakat terlebih dahulu. Agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau keinginan kemudian itu bisa menjadi pertimbangan pemerintah sebelum membuat kebijakan program bantuan.

2. Dalam hal pelaksanaan program bantuan perumahan layak huni, seharusnya pemerintah bisa menggunakan metode pendekatan pembangunan partisipatif. Dimana peran masyarakat yang bukan saja sebagai obyek melainkan harus mampu memposisikan masyarakat sebagai subyek atas perencanaan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program menjadi peran aktif.
3. Dalam hal pemilihan lokasi atau tempat pembangunan perumahan layak huni, sesuai dengan tujuan pemerintah memberikan bantuan perumahan layak huni untuk merelokasikan pemukiman kawasan rawan banjir ketempat yang lebih aman. Tentu pemerintah terlebih dahulu harus mengetahui dimana lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh banjir, melalui diskusi bersama masyarakat itulah seharusnya pemerintah bisa mendapatkan gambaran lokasi yang cocok untuk perumahan layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Grafika Offse
- Ahmadi, Abu. 2002. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Affifudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep Teori dan Implementasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.
- Anwas, M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edisi kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Darsono, Wisadirana. 2005. *Sosiologi Pedesaan*. Edisi kedua. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Dwirianto, Sabarno. 2013. *Kompilasi Sosiologi Tokoh dan Teori*. Pekanbaru: UR Press.
- Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press.
- Hendriwan. 2003. *Penanggulangan Kemiskinan Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Edisi Revisi*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Marzali, Ali. 2009. *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Nugroho D, Riant. 2003. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sajogyo, dan Sajogyo, Pudjiwati. 1996. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press.
- Setiadi, M. Elly, dan Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya..* Jakarta: Prenada Media Group.

- Siagian, Sondang. P. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soelaiman, M. Munandar. 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi, Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo, 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Soewondo, Nani. 1982. *Hukum dan Kependudukan di Indonesia*. Bandung: Offset Angkasa.
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Suryahadi, Asep, dan Sumarto. 2001. *Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia*. Jakarta: Smeru Newsletter.
- Sutrisno, edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, Smith, terjemahan Arsyad Lincoln dkk.2011. *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta: Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Wahidi, Roestanto. 2015. *Membangun Perdesaan Modern*. Bogor: PT Indec.
- Wasistiono, S dan Durachman, Budi. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media.
- Widjaja, BAW. 2002. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Skripsi:**
- Sri Wahyuni, 2014. *Respon Nelayan Terhadap Program Bantuan Pemerintah Desa Tanjung Lumba-Lumba Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*.
- Rezky Susanti, 2015. *Peran Pendamping Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis*.
- Ikhsan Budi Setiawan, 2017. *Respon masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Kereta Api di Desa Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir*.
- Hermansyah, 2007. *Bantuan Perumahan Bagi Korban Banjir di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan*.
- Novy Rahman, 2015. *Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*.

Internet:

<http://www.rumahku.com/artikel/read/jumlah-rumah-tak-layak-huni-di-indonesia-2-51-juta-unit-413680> diakses pada tanggal, 11 Juli 2017. Pukul 20.00 WIB.